

## PENAJAMAN PERAN PERGURUAN TINGGI PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH\*)

Oleh;

Ali Munawar\*\*)

Dosen Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta

### ABSTRAK

Pertanian merupakan sektor sangat penting dalam ekonomi Indonesia. Bukan hanya karena kontribusinya yang cukup besar terhadap pendapatan nasional, sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan) merupakan penyedia kebutuhan pokok (pangan, sandang, dan papan) orang banyak. Oleh karena itu sektor ini harus menjadi perhatian lebih besar semua kalangan, termasuk perguruan tinggi pertanian. Perguruan tinggi pertanian (PTP) memegang peranan sangat penting dan strategis dalam pembangunan sektor pertanian. Ia merupakan penyedia dan penghasil sumberdaya manusia dan sebagai tempat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 1 angka 9. Jumlah PTP di Indonesia cukup banyak, ada di setiap provinsi dalam beragam bentuknya, seperti fakultas di universitas atau institut, sekolah tinggi, politeknik dan akademi. Namun, dalam pelaksanaannya peran penting PTP tersebut dipandang masih belum maksimal, misalnya keberadaan program studi yang tidak sesuai dengan pasar kerja atau kegiatan penelitian yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atau petani di lapangan. Akibatnya banyak lulusan dari suatu program studi yang tidak terserap oleh dunia kerja dan banyak hasil penelitian dosen dan mahasiswa kurang memberikan manfaat nyata terhadap kemajuan sektor pertanian di daerah tempat PTP itu berada. Salah satu penyebab kurangnya sinerjitas kegiatan PTP dengan kebutuhan pemerintah daerah dan pihak berkepentingan lainnya adalah belum adanya landasan hukum yang khusus untuk itu. Dengan kebijakan terbaru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MB-KM), maka peluang keterlibatan PTP dalam pembangunan daerah menjadi lebih terbuka. Untuk itu landasan hukum yang khusus mengatur secara jelas tata hubungan yang mengikat para pihak sangat diperlukan. Sebagai contoh PTP negeri yang berada di suatu provinsi diberi tanggung jawab dalam pembangunan pertanian tertentu yang bersifat *mandatory*, dengan segala kesepakatan yang menyertainya.

**Kata kunci:** *perguruan tinggi, pembangunan, pertanian, tridharma, peraturan.*

\*) Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Nasional "*Sinergitas Pentahelix dalam Memulihkan Sektor Pertanian di Era Tatanan Kebiasaan Baru*" pada tanggal 14 Oktober 2010 di Eastparc Hotel Laksda Adisucipto KM 6,5 Jl. Kapas No. 1, Kec. Depok, Kab. Sleman, DI Yogyakarta 55281

## **I. PENDAHULUAN**

Pertanian merupakan sektor sangat penting dalam ekonomi Indonesia. Bukan hanya karena kontribusinya besar terhadap pendapatan nasional, sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan) merupakan penyedia kebutuhan pokok (pangan, sandang, dan papan) semua orang. Tidak salah, jika sektor pertanian sangat penting untuk menjaga stabilitas dan pertahanan nasional (Budianta, 2010).

Pembangunan sektor di Indonesia berjalan melalui pasang dan surut. Indonesia pernah mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) karena berhasil swasembada beras pada era tahun 1984-1986. Kemudian sektor pertanian mengalami berbagai tantangan dan persoalan bersamaan krisis moneter pada akhir tahun 1990-an. Dari yang semula swasembada, bahkan dapat mengekspor beras ke berbagai negara dan berhasil mengendalikan jumlah penduduk, Indonesia kemudian pernah menjadi salah satu pengimpor beras terbesar di dunia, setelah China dan India (Febriaty, 2017). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada periode Januari-Juli 2011, Indonesia telah menggelontorkan dana tidak kurang dari 45 triliun untuk mengimpor segala rupa produk pangan mentah dan olahan, mulai dari beras hingga singkong. Begitupula dengan buah-buahan tropis impor yang membanjiri pasar kita, mulai dari durian Bangkok hingga lengkeng dari China.

Menyadari akan persoalan yang begitu kompleks dan kondisi pertanian yang tidak memuaskan, maka pada tahun 2005 pemerintah menjalankan program yang disebut dengan Revitalisasi Pertanian dengan sasaran pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penyediaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan (Budiatna, 2010). Namun hasil program ini juga tidak seperti yang diharapkan. Berbagai upaya sudah dan sedang dilakukan dalam pemerintahan yang sekarang, misalnya dengan penyederhanaan berbagai regulasi, lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang lahan pertanian berkelanjutan, dan memperbesar anggaran untuk petani. Hasilnya telah menunjukkan adanya perbaikan kondisi di bidang pangan, seperti penurunan inflasi dan kenaikan kesejahteraan petani.

Karena begitu kompleksnya pembangunan dan tantangan yang besar sektor pertanian, keterlibatan dan komitmen berbagai pihak sangat diperlukan, termasuk dunia pendidikan. Perguruan tinggi pertanian (PTP) memegang peranan sangat penting dan strategis dalam pembangunan sektor pertanian. Ia merupakan penyedia dan penghasil sumberdaya manusia dan sebagai tempat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 1 angka 9. Namun dalam pelaksanaannya, fakta menunjukkan bahwa peran PTP masih kurang maksimal. Peran PTP hingga saat ini cenderung tradisional, yakni menghasilkan lulusan atau sarjana. Kontribusi yang berupa pemikiran dan inovasi teknologi masih terbatas. Keterbatasan keterlibatan langsung PTP dalam pembangunan antara lain karena sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur peran PTP dalam pembangunan daerah, khususnya di pertanian.

Tulisan ini secara singkat menjelaskan peran yang dapat dilakukan oleh PTP dalam pembangunan bidang pertanian dan mencoba memosisikan PTP dalam sebuah kerangka peraturan kerjasama yang dapat mewadahi peran-peran tersebut, sehingga dapat berkontribusi lebih baik pada pembangunan pertanian, sekurang-kurangnya bagi masyarakat (petani) di wilayah PTP berada.

## **II. PERAN PERGURUAN TINGGI PERTANIAN DI INDONESIA**

Pada saat ini di hampir seluruh provinsi di Indonesia terdapat perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi di bidang ilmu-ilmu pertanian dalam arti luas, yang mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Bentuknya pun beragam dari jenjang diploma atau akademi, politeknik, sekolah tinggi, fakultas sampai dengan institut, yang secara kolektif disebut perguruan tinggi pertanian (PTP). Jumlahnya mendekati 180 institusi, yang tersebar dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Ini jumlah yang tidak sedikit, dan menggambarkan betapa pentingnya sektor pertanian seluruh pelosok tanah air.

Dalam berbagai kesempatan sering dipertanyakan oleh banyak kalangan, terutama mereka yang berprofesi di bidang non-pertanian. Mengapa dunia pertanian kita begini-begini saja, tidak maju, pasar kita kebanjiran produk import termasuk beras? Padahal sumberdaya pertanian melimpah, dengan tanah yang luas dan subur, air tersedia, sinar matahari melimpah sepanjang tahun, demikian pula sumber genetik (tumbuhan dan hewan) yang sangat beragam. Dari segi kelembagaan, fakultas pertanian (baca PTP) dan lembaga penelitian dan pengembangan di bawah kementerian teknis banyak dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. Apa yang salah dengan dunia pertanian kita? Bagaimana peran PTP dan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan pertanian tersebut?

Meskipun tidak diatur dalam perundang-undangan secara khusus, peran perguruan tinggi, termasuk PTP, secara umum dinyatakan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi di tanah air, PTP memiliki mandat untuk melaksanakan tiga pokok kegiatan yang dikenal sebagai tridharma perguruan tinggi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Pendidikan Tinggi Pasal 1 angka 9, bahwa kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa pendidikan tinggi bertujuan untuk (a) berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; (b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (c) dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermartabat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan (d) terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **A. Tugas Pokok Perguruan Tinggi Pertanian**

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di atas maka PTP memiliki beberapa peran penting dalam pembangunan pertanian, yaitu menyiapkan dan memasok sumberdaya manusia pembangunan pertanian, mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian, dan memanfaatkan sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian untuk kepentingan masyarakat. Di bawah ini secara singkat diuraikan bentuk pelaksanaan dari tridharma perguruan tinggi.

#### **1. Penyedia dan Pemasok Sumberdaya Manusia**

Sebagai penyedia dan pemasok sumberdaya manusia untuk pembangunan pertanian, PTP bertugas melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran. Dalam proses ini kurikulum dan proses pembelajaran memegang peranan sangat penting dan strategis. Sebagaimana konsep kurikulum pendidikan tinggi, PTP diharapkan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang ditunjukkan oleh sikap, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memiliki keterampilan dalam bidang pertanian. Selama dalam proses pendidikan di kampus, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan potensi diri secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan bakatnya melalui berbagai kegiatan, sehingga setelah lulus siap memasuki dunia kerja sesuai bidang yang digelutinya. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MB-KM) memberikan ruang yang luas dalam penyelenggaraan pendidikan di kampus-kampus PTP agar selalu relevan dengan kebutuhan mahasiswa sekaligus masyarakat di luar kampus.

Selain kurikulum yang mantap, untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi, proses pendidikan juga melibatkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi tinggi, serta sarana dan prasarana pendukung, seperti ruang kuliah dan laboratorium dengan peralatan yang cukup. Dosen merupakan sumberdaya manusia dengan kualitas pendidikan baik, sekurang-

kurangnya bergelar Master (S2) untuk pendidikan jenjang Sarjana dan Doktor (S3) untuk jenjang Magister (S2). Dengan demikian di sebuah PTP tersedia sumberdaya manusia unggul (dosen dan mahasiswa) dan fasilitas yang berpotensi untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan pertanian. Jenis kepakaran atau keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya pendukung yang dapat disumbangkan tergantung kepada jenis program studi yang dilenggarakan oleh PTP.

## 2. Pengkajian dan Pengembangan Ilmu dan Teknologi

Perguruan tinggi pertanian di Indonesia dan di dunia pada umumnya memiliki bidang cakupan yang cukup luas, yang di Inonesia sering disebut bidang agrokompleks. Bidang agrokompleks ini memberikan batasan pertanian dalam arti luas, yakni mencakup pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan teknologi pertanian baik pada tingkat produksi (*on-farm*), pascapanen (*industrial - processing*), maupun pemasaran dan perdagangan produk pertanian. Dalam perannya sebagai temat pengkajian dan pengembangan ilmu dan teknologi, PTP dituntut aktif melaksanakan kegiatan penelitian agar selalu mengikuti dan berada di garis depan perkembangan ilmu pengetahuan di bidangnya, sehingga mampu menghasilkan karya inovatif yang dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan sendiri maupun kepentingan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan hasil-hasil penelitian yang dikembangkan tidak hanya berakhir pada publikasi di jurnal-jurnal bereputasi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk dan kegiatan yang dapat diterapkan oleh masyarakat. Selain itu, hasil-hasil penelitian dari para dosen diharapkan dapat memperkaya isi bahan kuliah yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa.

Salah satu peluang untuk mewujudkan peran ini, pada saat ini Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional menyediakan berbagai skema pendanaan riset bagi dosen, baik yang

bersifat kompetitif nasional maupun desentralisasi yang diserahkan pengelolaanya kepada perguruan tinggi masing-masing, dan skema penugasan. Besarnya dana tergantung kepada skema masing-masing penelitian. Di antara skema tersebut ada yang membutuhkan peran keterlibatan pihak pemerintah, industri, maupun masyarakat. Dengan demikian, penelitian dapat menjadi ajang komunikasi dan kerjasama produktif antara PTP dengan berbagai pemangku kepentingan yang lain.

### 3. Pengabdian kepada Masyarakat

Keberadaan PTP di tengah-tengah masyarakat dituntut untuk memberikan sumbangsih untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasinya, sesuai yang dibutuhkan. Karena sebagian besar masyarakat di pedesaan adalah petani, maka program pengabdian kepada masyarakat di PTP sangat relevan dengan kebutuhan para petani. Melalui kegiatan ini PTP diharapkan bukan hanya memberi, tetapi juga mendapatkan umpan balik dari apa yang berkembang di dalam masyarakat untuk menjadi bahan kajian dan penelitian di kampus, yang hasil kemudian dapat menjadi solusi persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian akan terjadi hubungan yang dinamis antara penyelenggara pendidikan tinggi dan masyarakat.

Seperti halnya kegiatan penelitian, pada saat ini Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional juga menyediakan berbagai skema pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang semuanya mensyaratkan keterlibatan langsung masyarakat. Dengan demikian ini menjadi ajang strategis untuk terjalinnya kerjasama antara PTP dengan pemerintah dan masyarakat.

Untuk melaksanakan ke tiga tugas pokok PTP tersebut ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

1. Pembukaan program studi baru dan penyusunan kurikulum wajib melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dari dalam maupun dari luar kampus, misalnya Dinas/Instansi teknis terkait dengan bidang pertanian, wakil rakyat, asosiasi pengusaha, komunitas petani berbagai komoditas, pelaku bisnis, dan perguruan tinggi lainnya.
2. Memperkaya pelaksanaan program pembelajaran dengan melibatkan narasumber (*resource person*) dari luar kampus atau pengguna lulusan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan mahasiswa.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman di luar kampus agar lebih peka dan terlatih memahami isu-isu penting yang berkembang di masyarakat, sehingga ketika lulus mereka lebih siap terjun ke dunia kerja.
4. Memberikan kesempatan kepada tenaga pengajar (dosen) untuk terlibat di dalam pemecahan persoalan pertanian yang di hadapi oleh masyarakat. Kegiatan ini sangat penting agar para dosen lebih peka terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat dan memberikan solusinya. Kegiatan menjadi konsultan perlu diakomodasi dalam penilaian kinerja dosen dan mendapatkan penghargaan (angka kredit) yang proporsional, dan menjadi bagian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Perumusan peta jalan penelitian (*research roadmap*) di PTM perlu dibangun dengan melibatkan berbagai kepentingan agar kegiatan penelitian para dosen dan mahasiswa relevan dengan persoalan masyarakat dan hasil penelitiannya lebih bermanfaat.
6. Perlu ada kebijakan yang berpihak kepada anak-anak petani dalam penerimaan mahasiswa di PTP. Pada umumnya anak-anak petani di pedesaan tidak mendapatkan pendidikan yang sebagus anak-anak yang berada di perkotaan, sehingga daya saing masuk ke perguruan tinggi lebih rendah. Anak-anak petani sudah terbiasa dengan kehidupan di pedesaan dengan lingkungan agraris, sehingga relatif lebih dapat memahami dan mengapresiasi



dunia pertanian dibandingkan dengan anak-anak kota. Sebaliknya anak-anak kota yang masuk ke program studi di PTP sangat mungkin karena mereka tidak diterima di program studi lainnya.

### **B. Penajaman Peran Perguruan Tinggi Pertanian**

Menurut pengamatan penulis, pada saat ini kebanyakan hubungan antara perguruan tinggi dengan pihak pemerintah pada umumnya diawali oleh hubungan baik individual dari pucuk/unsur pimpinan PTP dengan pimpinan daerah atau seorang staf PTP dengan staf di pemerintah daerah. Karena sifatnya individual atau perseorangan, seringkali hubungan tersebut bersifat sementara, yakni pada pimpinan masih aktif menjabat. Karena jabatan itu bersifat sementara dan berganti, jika pimpinan yang baru memiliki gaya kepemimpinan dan personaliti yang berbeda dengan pejabat sebelumnya, seringkali hubungan terputus. Jadi hubungan antar instansi lebih sering karena "kebetulan" bukan karena hubungan formal yang tersistem. Dalam hubungan yang tersistem, hubungan instansi tidak akan tergantung kepada siapa yang memimpin. Fenomena tersebut sangat umum terjadi dan sebenarnya tidak ada yang salah. Namun secara konsep manajemen hubungan demikian lemah, sehingga harus diwadahi atau didukung oleh sebuah sistem institusional yang mengedepankan hubungan profesional daripada hubungan individual dan emosional yang bersifat kondisional. Selain mekanisme jalinan kerjasama yang bersifat kondisional, seringkali substansi yang dikerjakasikan juga masih terbatas yang sifatnya dalam bahasa sehari-hari disebut "proyek" yang sifatnya terbatas, sehingga ikatan kerjasamanya kasuistis, tergantung kepada pekerjaan.

Sehubungan dengan fenomena di atas, dalam rangka memperkuat ikatan kerjasama yang lebih substantif dan jangka panjang, perlu dirumuskan sebuah model yang memungkinkan hubungan kerjasama lebih substantif dan jangka panjang, sehingga berdampak saling menguntungkan secara kelembagaan maupun pihak-pihak yang terdampak langsung maupun tidak langsung.

Dalam perspektif sejarah di dunia dan juga Indonesia, peranan dan kontribusi PTP dalam pembangunan pertanian sangat besar. Sebagai contoh, dalam sejarah di

Amerika Serikat, kemajuan sektor pertanian maju pesat karena ditopang oleh sebuah sistem hubungan dalam bentuk *land-grant universities* (LGU). Sistem ini diawali dengan pemberian sejumlah satu bidang tanah (*land*) dari pemerintah pusat (federal) kepada pemerintah negara bagian (*states*) untuk dijual yang dananya untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi/universitas. Misi universitas ini adalah mengajarkan terutama bidang pertanian, sains, ilmu militer, dan teknik untuk mendukung revolusi industri dan perubahan sosial pada waktu sekitar itu 1862. Salah satu kewajiban (mandat) untuk LGU adalah harus ikut dalam pembangunan pertanian melalui pendidikan atau keterampilan praktis, terutama di bidang pertanian, yang dalam pelaksanaannya adalah fakultas yang membidangi ilmu-ilmu pertanian, yaitu College of Agriculture atau Fakultas Pertanian (PTP). Di dalam sistem ini, para dosen di PTP dituntut untuk memahami benar bidang pertanian di negara bagian PTP itu berada, termasuk sumberdaya pertanian, seperti tanah, jenis tanaman, jenis ternak dll, penguasaan teknologi produksi (*on-farm*), pemrosesan produk (*processing*) sampai dengan pemasaran, atau dari hulu ke hilir. Seorang orang dosen Ilmu Tanah misalnya, dia harus menguasai secara mendalam luas tanah, sifat-sifat, potensinya, cara mengelola untuk seluruh tanah yang ada di negara bagian. Dengan pemahaman tersebut, maka kelompok Dosen Ilmu Tanah bekerjasama dengan dosen bidang pertanian lain dapat merumuskan rekomendasi pemupukan untuk seluruh tanah pertanian di negara bagian. Dengan demikian, maka sektor pertanian di negara bagian itu sangat terbantu oleh keberadaan PTP di negara bagiannya. Contoh yang lain, seorang Pimpinan atau Dekan sebuah PTP di LGU adalah orang yang benar-benar memahami kondisi pertanian secara di negara bagian itu, karena dia dituntut untuk melakukan berbagai lobi di tingkat kebijakan di tingkat negara bagian dan federal agar mendapatkan dana untuk fakultasnya. Alhasil, PTP di LGU telah benar-benar berkontribusi terhadap kemajuan pertanian di negara bagian masing-masing, dan kesuksesan itu masih berlangsung sampai saat ini, meskipun LGU sudah berubah jadi perguruan tinggi yang sudah terbuka.

Dalam sejarah perguruan tinggi pertanian di Indonesia, tampaknya para pendahulu kita sampai batas tertentu telah terimbas/terdedah pada sistem tersebut. Pada tahun awal menjelang berdirinya Institut Pertanian IPB, sekitar 1957 salah

satu tokoh perintis perguruan tinggi pertanian Indonesia, yaitu Dr. Ir. Toyib Hadiwidjaya Dekan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia, yang kelak menjadi IPB melakukan studi komparatif ke beberapa LGU di Amerika Serikat, yakni *University of Kentucky, Cornell University, University of Wisconsin, University of California*, dan *University of Rhode Island* (Anonim, 2001). Dalam perjalanannya, IPB telah membuktikan kontribusinya terhadap pembangunan pertanian di tanah air, misalnya melalui konsep BIMAS. Demikian pula Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan konsep Badan Usaha Milik Daerah (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD), yang pertama kali dibentuk (pertengahan 1970-an) sebagai proyek percontohan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian diterapkan secara nasional. Dampaknya cukup fenomenal, antara lain Indonesia mampu berswasembada beras.

Sehubungan dengan gambaran dan sejarah di atas, maka ada baiknya peran PTP dalam pembangunan pertanian di Indonesia perlu dirumuskan kembali agar kontribusinya lebih signifikan dalam jangka panjang. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

1. Perlu dialog antara PTP, pemerintah, dan pemangku kepentingan di bidang pertanian untuk merumuskan bagaimana mendudukkan PTP dalam pembangunan daerah, khususnya di bidang pertanian.
2. Dalam hal suatu daerah (provinsi) terdapat lebih dari satu PTP maka perlu berbagi peran PTP sesuai dengan kondisinya, bidang yang dikembangkan, kepakaran sumberdaya manusia, dan sumberdaya penunjang/fasilitas dan.
3. Perlu dibicarakan skema pendanaan untuk kepentingan bersama, melalui penganggaran di masing-masing PTP dan pemerintah daerah, atau penganggaran bersama, dan/ atau melalui anggaran dari pemerintah pusat.

Tentu itu sebuah upaya yang tidak mudah, karena membutuhkan komitmen, waktu, dan sumberdaya dan dana. Namun yang jelas, setiap upaya bekerja sama untuk kepentingan orang banyak di negara tercinta ini perlu terus kita tumbuh kembangkan di mana pun kita bertugas.

### **III. PENUTUP**

1. Perguruan tinggi pertanian Indonesia memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan daerah, terutama di bidang pertanian dan perlu terus dikembangkan.
2. Peran utama PTP adalah melalui melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yakni penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agar lulusannya memiliki kompetensi yang memadai dalam hal sikap, penguasaan ilmu dan teknologi di bidang pertanian yang relevan dengan perkembangan terkini dan kebutuhan masyarakat, terus melakukan penelitian yang menghasilkan inovasi-inovasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat; dan selalu menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang pertanian.
3. Perlu dirumuskan sebuah mekanisme hubungan kerjasama kemitraan yang dapat mendudukan peran PTP dalam pembangunan daerah, terutama di bidang pertanian di wilayah (provinsi) tempat PTP berada.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. 2001. Sejarahh Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. IPB Press. 429 p.
- Budiatna, A. 2010. Revitalisasi pertanian penggerak utama pembangunan kawasan pertanian di Indonesia. Mektek 2(1): 69-76.
- CNN Indonesia. 2018. Jumlah petani berkurang, tingkat pengangguran di desa naik. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181105141729-532-344096/jumlah-petani-berkurang-tingkat-pengangguran-di-desa-naik> On line 10 Oktober 2020.
- Febriyati, H. 2017. Analisis perkembangan impor beras di Indonesia. Ekonomikawan, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 16(2). DOI: <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v16i2.941>. On line 7 Oktober 2020
- Rahman, S. 2014. Pentingnya Ilmu Pertanian dan Pangan Digeluti Generasi Muda. Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan 3(2): v-vi.